

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang diperjuangkan untuk seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah otonom.

Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah UU No. 25/1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kini telah direvisi menjadi UU No. 33/2004. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dan No. 108/2000 serta Kepmendagri No. 29/2002 yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban daerah yang didalamnya termuat pula tentang kinerja pemerintah daerah (Emile, 2005).

Pengelolaan keuangan negara yang akan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah tidak lepas dari anggaran yang disepakati bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian. Anggaran ini berfungsi

perencanaan dan pengendalian, juga sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan mengevaluasi prestasi (Kennis, 1979 dalam Emile, 2005). Anggaran di samping sebagai alat memotivasi manajer tingkat bawah juga bermanfaat dalam memudahkan perencanaan (Chow, et.al., 1988 dalam Siti, 2001). Dalam memotivasi bawahan dapat dilakukan dengan memberi penghargaan berupa bonus, insentif tambahan, pujian maupun hadiah. PP 105/2000 pasal 20 disebutkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan bagian pendapatan yang membiayai berbagai belanja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan serta jenis belanja dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Anggaran merupakan elemen kunci (*key element*) dalam sistem perencanaan dan pengendalian (Schieff dan Lewis, 1978 dalam Emile, 2005). Fungsi perencanaan merupakan langkah awal manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan (pengorganisasian) tidak akan efektif tanpa fungsi pengendalian, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya dan pada akhirnya akan berdampak pula pada kinerja manajerial.

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa dukungan anggaran dapat mempengaruhi kinerja manajerial (Peter's dan O'connors, 1980; Blumberg dan Pringle, 1982; Nouri dan Parker, 1998 dalam Widi dan Mohamad, 2002).

Participasi anggaran akan menimbulkan adanya keakutuhan anggaran dan

kemudian akan mempengaruhi kinerja (Nouri dan Parker, 1998 dalam Widi dan Mohamad, 2002). Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung melalui komitmen organisasi.

Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan menerima dukungan anggaran yang memadai, dengan kecukupan anggaran dapat mempererat hubungan karyawan dengan organisasi, dan komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Randall, 1990 dalam Widi dan Mohamad, 2002). Adanya kejelasan dalam penyusunan anggaran, maka karyawan akan berusaha untuk memastikan bahwa dukungan anggaran memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini kemungkinan besar dapat meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Karyawan dengan dukungan anggaran yang memadai, akan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari pada karyawan yang tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai. Jika terdapat kecukupan anggaran maka karyawan akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan demikian kinerjanya juga akan baik.

Sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian akuntansi (Miah dan Mia, 1996 dalam Emile, 2005) berguna untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa efektifitas rancangan sistem pengendalian akuntansi tergantung pada konteks penggunaannya pada masing-masing organisasi itu sendiri (Anthony, 1965; Mintzberg, 1975; Bruns dan Waterhouse, 1975; Ansari, 1977; Merchant, 1981, 1984; Machintosh, 1981.

Simons, 1987 dalam Emile, 2005). Pencapaian kinerja yang meningkat karena digunakannya sistem pengendalian akuntansi akan menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan, operasional dan manajerial dalam organisasi.

Penelitian ini akan menguji pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial pada instansi pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Emile dan Abdul (2005) dengan perbedaan sampel yang digunakan dan menambah variabel komitmen organisasi. Penambahan variabel komitmen organisasi dikarenakan peneliti melihat keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi yang dimungkinkan dapat berpengaruh pada kinerja manajerial dalam pemerintah daerah dan dengan mempertimbangkan saran dari peneliti terdahulu untuk menambah variabel lain yaitu komitmen organisasi. Oleh karena itu dipilih variabel komitmen organisasi sebagai tambahan untuk diuji apakah berpengaruh terhadap kinerja dalam pemerintah daerah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL INSTANSI PEMERINTAH DAERAH”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah, dan sistem pengendalian akuntansi sebagai variabel independen terhadap kinerja manajerial sebagai variabel dependen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah, sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial pada instansi pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintahan daerah maupun pusat di Indonesia.
2. Bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian tersebut.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah, sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial pada instansi